

PERDEBATAN ILMU POLITIK SEBAGAI PENGETAHUAN ILMIAH:**SEBUAH TINJAUAN RINGKAS**

Oleh:

Ariesani Hermawanto

E-mail: ariesanihermawanto@gmail.com

Program Studi Ilmu hubungan Internasional

Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu politik UPN "Veteran" Yogyakarta

Abstract

Political science as a branch of social science which had foundations, frame, focus, and a clear scope; it can be said that political science is still young age because its birth in the late 19th century. As a scientific knowledge, political science has resulted debates among scientists. Because of these, the social science scholars have subsequently agreed with the definition of science is the sum of coordinated knowledge relative to determine subject). But many political scientists are not satisfied with this broad formulation, which then prompted experts to develop the scientific method. Political science need to use new ways to examines the symptoms and political events in a more systematic, relying empirical experiences using a detailed theoretical framework and rigorous. This new approach is known as behavioral approach. This behavioral approach encourages the development of political science as a scientific discipline until the present. Although this approach is not free from criticism, especially traditionalist approach, but in political analysis this approach is very useful to understand the political phenomenon.

Kata Kunci: **Ilmu politik** **sains** **metode ilmiah** **behavioralisme**

Pendahuluan

Ilmu politik adalah salah satu cabang disiplin ilmu sosial yang berhubungan dengan teori dan praktek politik, deskripsi dan analisis sistem politik, serta perilaku politik. Secara saintifik muncul perdebatan mengenai ilmu politik sebagai ilmu yang ilmiah atau tidak; juga perdebatan tentang formasi konsep keilmuan dan generalisasi dalam ilmu politik. Meskipun ilmuwan politik rentan terhadap perdebatan dan ketidaksepakatan, akan tetapi mayoritas dari mereka melihat bahwa disiplin ilmu politik adalah merupakan ilmu yang asli (*genuine*). Akibatnya para ilmuwan politik seringkali berusaha meniru objektivitas secara konseptual dan metodologis seperti yang berlaku pada ilmu-ilmu 'keras' (misalnya: biologi, kimia dan fisika). Mereka melihat diri mereka terlibat dalam peristiwa dan kondisi-kondisi politik. Para ilmuwan politik selanjutnya berusaha membuat prinsip-prinsip umum tentang bagaimana dunia politik itu berlangsung. Didasarkan pada tujuan ini, adalah penting bagi seorang ilmuwan politik untuk menulis sesuatu dengan berlandaskan pada ketepatan konseptual, bebas dari bias dan penyimpangan, serta didukung oleh bukti-bukti yang empiris.

Ilmuwan politik harus menyadari dan peka terhadap cara mereka melakukan studi

dan penelitian. Hal ini karena, berbeda dengan ilmu pengetahuan alam, ilmuwan politik menghadapi masalah khusus dan sulit, yaitu: **pertama**, mereka seringkali menjadi obyek dari studi tersebut; **kedua**, mereka mempunyai nilai-nilai dan kecenderungan pribadi yang bisa mempengaruhi cara mereka melakukan penelitian. Oleh karena itu, agar bisa melakukan penelitian dengan benar maka ilmuwan politik harus menyadari metodologi yang mereka gunakan; yaitu prosedur yang mereka pakai dalam mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sebagian besar ilmuwan politik menggunakan model penyelidikan ilmiah yang sederhana ketika membangun teori. Kunci untuk membangun teori-teori yang tepat dan persuasif adalah dengan mengembangkan dan menguji hipotesis. Sedangkan hipotesis sendiri merupakan pernyataan peneliti yang bertujuan menguji apakah ada hubungan atau tidak diantara dua fenomena. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, tulisan ini akan meninjau bagaimanakah perdebatan tentang karakteristik saintifik politik sebagai sains?

Pembelaan ilmu politik sebagai sains

Pembelaan ilmu politik sebagai sebuah sains disebabkan adanya kritikan kaum tradisionalis terhadap penggunaan ilmu pengetahuan untuk menelaah politik serta penggunaan metode ilmiah dalam riset politik. Tradisionalisme dalam ilmu politik adalah studi politik yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, etika dan perspektif filosofis; serta erat kaitannya dengan tujuan, sifat dan organisasi dari negara. Kaum tradisionalis berbagi preferensi untuk studi kasus yang intensif serta menggunakan pengamatan kualitatif; di mana kesimpulan didasarkan atas norma subyektif dan nilai-nilai. Metode kuantitatif jarang digunakan karena kaum tradisionalis ragu bahwa 'metode ilmiah' ilmu-ilmu alam dapat diterapkan untuk penyelidikan perilaku manusia, yang lebih bersifat tak tentu. Penelitian kaum tradisionalis biasanya difokuskan pada deskripsi data historis, lembaga-lembaga politik, konstitusi dan sistem hukum. Kaum tradisionalis berusaha mengerti tentang politik dengan cara melakukan pengujian terhadap hukum, kantor-kantor pemerintahan, undang-undang yang berlaku, serta lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan politik (Grigsby, 2010:14). Pendekatan tradisionalis juga seringkali bersifat kesejarahan dan normatif secara bersama-sama; historis yaitu perubahan-perubahan aturan formal politik sepanjang sejarah melalui keputusan hukum dan juga aturan eksekutif, serta normatif yaitu harapan untuk menyediakan informasi demi memperbaiki aturan-aturan ini.

Pembelaan terhadap karakter ilmiah ilmu politik akibat adanya kritikan dari aliran tradisionalis itu antara lain sebagai berikut: **Pertama**, pembelaan dari kritikan bahwa perilaku manusia adalah kompleks. Memang diakui bahwa perilaku manusia adalah kompleks, seperti juga disiplin ilmu politik pun kompleks. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada disiplin keilmuan yang dapat mengharapkan pemahaman menyeluruh secara seketika, baik eksakta maupun non-eksakta. Adalah tidak ada alasan logis untuk menyimpulkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk meneliti masalah kompleks secara ilmiah. Jadi isi kritikan ini adalah tidak benar (Kweit & Kweit, 1986:55)

Sarjana politik bukanlah satu-satunya sarjana yang membicarakan peristiwa yang tidak

terjadi. Hal ini pun dialami oleh sarjana ilmu eksakta, misalnya kimiawan, dimana masalah di dalam ilmu kimia sangat kompleks dan sukar diketahui secara menyeluruh. Meskipun demikian bukan berarti yang tidak ditemukan itu tidak ada; dengan bukti semakin banyaknya ditemukan senyawa-senyawa kimia maupun unsur baru yang sebelumnya tidak ada.

Kedua, pembelaan karena adanya argumen bahwa perilaku manusia adalah akibat dari kemauan bebas. Sebagaimana halnya filsafat ilmu pengetahuan yang terletak pada asumsi determinisme serta perilaku manusia tersebut tidak terpolakan, maka asumsi seperti ini tidak dapat dibuktikan serta sulit terbukti secara empiris; sebab tidak ada jalan untuk membuktikan hubungan sebab akibat secara empirik. Oleh karena itu tidak mungkin untuk membuktikan hubungan sebab akibat yang ada dalam perilaku manusia; serta tidak mungkin untuk membuktikan tiadanya penyebab karena adanya kekurangan pengetahuan akan hal itu dalam diri manusia (Kweit&Kweit, 1986:54)

Melalui pemahaman yang lebih mendalam, terdapat alasan untuk menerima ilmu pengetahuan, yaitu adanya penyebab-penyebab dari terjadinya perilaku manusia. Dari konsep kemauan bebas, pada dasarnya menunjuk pada kesanggupan manusia untuk memilih tindakan mereka. Adanya kemauan bebas bukan berarti manusia akan memilih sesuatu secara acak. Adanya kesadaran tentang itu merupakan sebuah bukti bahwa sebenarnya manusia menjalani kehidupan sesuai dengan asumsi-asumsi ilmiah dalam determinisme. Kritikan bahwa ilmu pengetahuan tidak berguna karena adanya kemauan bebas manusia merupakan kritikan bebas terhadap ilmu sosial.

Adanya reaksi dari manusia yang menimbulkan efek yang tidak mengesankan, bisa diminimalkan dengan menggunakan etika-etika riset dalam ilmu pengetahuan. Suatu penelitian sangat wajar apabila mempunyai resiko, namun bukan berarti hal ini lantas mengakibatkan penelitian tidak berguna untuk dicoba. Ada tiga masalah etik yang timbul dalam hubungan antara ahli ilmu pengetahuan dengan masyarakat luas yang menjadi bagian risetnya, yaitu sebagai berikut :

Pertama, ilmu pengetahuan mempelajari apa itu (*what it is*), dan bukannya apa yang

seharusnya (*what should be*). Oleh karena itu penelitian secara mutlak mendukung *status quo*.

Kedua, ada ketakutan bahwa pengetahuan mengenai tingkah laku manusia yang dihasilkan penelitian ilmiah akan bermakna mengontrol dan memanipulasi orang lain.

Ketiga, apakah manfaat penelitian itu dan apakah ahli ilmu pengetahuan mempunyai tanggung jawab mengenai kegunaan yang diperbuat oleh penelitian.

Keempat, yang menyangkut tentang nilai. Dalam kenyataannya manusia mempunyai nilai dan nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi observasi mereka tentang dunia sekitar. Akan tetapi, adanya nilai bukan berarti merupakan hambatan yang tidak mungkin bagi ilmu pengetahuan. Metode ilmiah telah dirancang sebagai suatu usaha untuk meminimalkan sejauh mana hasil nilai ilmuwan itu membelok dalam interpretasinya tentang dunia sekitar (obyek). Observasi terus-menerus sepanjang waktu terhadap data ilmuwan-ilmuwan lain juga diperlukan, sebelum ditarik generalisasi tentang suatu masyarakat ilmiah sebagai hukum. Perbandingan observasi dan pengumpulan pengalaman dimaksudkan untuk mengontrol masing-masing nilai.

Dalam menelaah politik secara ilmiah bukan berarti sarjana politik tidak pernah mengevaluasi atau memberikan rumus. Aliran behavioralis berpendapat bahwa mungkin untuk menggabungkan studi politik secara ilmiah dengan studi tentang masalah nilai. Ilmu pengetahuan dari sudut pandang ini tidak bertentangan dengan nilai, tetapi merupakan prasyarat yang fundamental terhadap evaluasi atau preskripsi yang didasarkan pada nilai. Aliran behavioralis (aliran tingkah laku) berpendapat bahwa mempelajari perilaku manusia lebih bermanfaat dalam pengembangan ilmu politik, karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik (Budiardjo, 2008:74). Pendekatan dari aliran tingkah laku menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner yaitu suatu orientasi yang kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi ini antara lain adalah analisis politik

tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi peneliti; setiap analisis harus bersifat bebas nilai (*value-free*), sebab benar atau tidaknya sebuah nilai seperti demokrasi, kebebasan tidak dapat diukur secara ilmiah.

Metode Ilmiah

Para filosof ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya sependapat tentang apa yang membuat sesuatu itu dinamakan metodologi ilmiah. Meskipun demikian ada konsepsi yang telah diterima secara luas, bahwa metodologi ini telah disebut '*the standard view*' (pandangan baku). Berdasarkan ini, tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mengembangkan penjelasan-penjelasan tentang dunia empiris; yaitu dunia yang dapat diketahui oleh pengalaman atau observasi.

Sains adalah metode analisa yang obyektif, logis, dan sistematis untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan fenomena yang diamati. Berdasarkan hal ini maka ciri-ciri pokok sains adalah sebagai berikut (McGaw & Watson, 1976:10):

Pertama, sains adalah suatu metode analisa, bukan suatu kumpulan pengetahuan. Sains adalah suatu aktivitas, suatu proses yang bisa dibedakan dengan hasilnya. Walaupun substansi masing-masing bisa jauh berbeda, semua sains memiliki kesamaan metode analisa kesamaan dalam aturan logika dan pembuktian.

Kedua, tujuan akhir dari sains adalah deskripsi, eksplanasi, dan prediksi. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan, atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Eksplanasi berusaha menjawab tipe pertanyaan mengapa. Sedangkan prediksi mencoba menjawab pertanyaan 'apa yang akan terjadi di masa depan'.

Ketiga, fenomena yang bisa diamati merupakan sasaran dari deskripsi, eksplanasi, dan prediksi. Apabila obyek tidak bisa diamati secara langsung, maka tidak bisa dianalisa secara saintifik. Oleh karena itu penelitian saintifik tidak menangani topik-topik yang supranatural dan metafisik.

Keempat, sains bersifat obyektif, logis, dan sistematis. Obyektif bahwa pernyataan saintifik harus bisa diuji secara terbuka oleh ilmuwan lain (*intersubjective testability*). Logis berarti bahwa sains diatur oleh aturan penalaran

tertentu, misalnya penarikan kesimpulan deduktif atau induktif. Sedangkan sistematis berarti bahwa sains merupakan sekumpulan keajegan yang secara logika terorganisasi saling bertaut dan utuh, serta terbuka untuk diubah ataupun ditolak oleh bukti-bukti baru.

Dalam mempelajari ilmu politik perlu untuk memahami bahwa semua pengetahuan bersifat publik, dengan sejumlah asumsi yang penting dan kritis sebagai berikut (Zuckerman, 1991:3) :

Pertama, tidak adanya kebenaran yang tersembunyi dan tidak adanya penyetera (*purveyor*) kebenaran yang tidak pernah salah. Oleh karena setiap orang mungkin melakukan kesalahan, maka untuk mengetahui dunia politik seharusnya memasukkan sebuah evaluasi dari klaim yang disebut dengan pengetahuan.

Kedua, siapapun yang mempelajari politik harus menyediakan dukungan yang akan meyakinkan orang lain. Kasih sayang emosional, prasangka manusia, dan pemahaman intuitif tidak cukup untuk menjustifikasi klaim terhadap pengetahuan. Ini bukan berarti bahwa intuisi seseorang adalah salah, namun hal itu tidak relevan ditinjau dari secara keperluan. Di dalam masalah politik, misalnya dalam membahas mengenai tingkat pemberian suara dalam pemilihan, menghitung tingkat pengangguran, atau menjelaskan akibat kerusakan karena perang atau revolusi; diperlukan mandate (*credentials*) yang membenarkan analisis tersebut, serta tidak kurang pentingnya adalah perlunya untuk menaksir pengetahuan dengan standar yang bisa dikontrol orang lain pada waktu berbeda.

Ketiga, hubungan yang logis dan fakta-fakta adalah kriteria yang paling luas diterima dalam rangka membentuk pengetahuan ilmiah. Hubungan logis memerlukan definisi yang tepat mengenai konsep-konsep kunci, sebagaimana asal mula deduksi dan induksi.

Keempat, untuk melakukan kegiatan dalam ilmu politik harus menggunakan asumsi bahwa dunia politik adalah tempat yang teratur.

Kelima, aturan-aturan alam adalah sistematis, dimana tidak hanya keteraturan yang dapat ditemuikan, namun juga sebuah bentuk dari system; dan ini akan diperoleh bila berhasil dalam penyelidikan. Asumsi ini mendorong untuk memberikan ide-ide, mendorong kemampuan untuk menganalisa dunia sampai ke batas-

batasnya.

Keenam, di saat yang sama, tidak berasumsi bahwa sebuah aturan itu jelas dengan sendirinya (*self evident*). Ilmuwan harus menganalisa secara aktif, mengusulkan dan menguji ide-ide mengenai alam; yang berasal dari aturan-aturan dunia. Hanya penggunaan yang aktif dari kemampuan intelektual yang dapat membawa logika dan fakta-fakta untuk menunjang proposisi dan hipotesa.

Ketujuh, ilmu yang empiris -seperti ilmu politik- mengakui pemusatan dalam pikiran untuk tujuan mengetahui dunia, namun terdapat sebuah realitas diluar usaha logika semata untuk mengetahuinya. Untuk mengetahui dunia fisik melalui persepsi, maka ilmuwan politik harus dapat menggali informasi yang relevan dari hal-hal yang ada yaitu objek.

Kedelapan, asumsi bahwa alam yang *granular* memungkinkan menggunakan fakta-fakta dari dunia untuk menguji eksplanasi.

David Hume mengatakan bahwa observasi empirik tidak dapat menggantikan nilai. Oleh karena itu sains yang melibatkan dunia empirik tidak berbicara tentang nilai. Meskipun demikian penelitian empirik tidak dapat sama sekali lepas dengan nilai; dimana nilai memainkan peran penting dalam menentukan apa yang akan diteliti, bagaimana hal itu diteliti, dan bagaimana penelitian akan digunakan.

Riset yang dilakukan oleh ilmuwan adalah melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi atau fakta tentang dunia empirik. Mereka menunjukkan eksistensi hubungan keumuman (*commonabilities*) diantara fenomena. Keumuman ini diringkaskan dalam sebuah kata yaitu *konsep*. Ilmuwan juga berusaha menentukan eksistensi hubungan diantara konsep-konsep ini. Statement hubungan diantara konsep-konsep ini dinamakan *generalisasi*. Untuk menjelaskan hubungan yang ada, ilmuwan beralih ke statemen dengan membuatnya menjadi abstraksi dan generalitas. Statemen yang lebih umum dan abstrak ini apabila saling dikaitkan satu sama lain akan menghasilkan *teori*.

Generalisasi dan teori selanjutnya haruslah diverifikasi oleh penelitian yang berkesinambungan, yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah observasi sesuai dengan apa yang diharapkan; jika generalisasi dan teori yang dikemukakan itu benar. Jadi dalam proses ini

terdapat tiga langkah pokok yaitu: (1) menciptakan konsep guna menunjukkan keumuman diantara fenomena, (2) menciptakan generalisasi guna menunjukkan hubungan yang ada diantara konsep-konsep, (3) menciptakan teori guna menjelaskan hubungan yang diamati.

Konsep

Manusia dalam berpikir menggunakan 'bahasa' yaitu suatu sistem komunikasi yang terdiri dari simbol-simbol dan serangkaian aturan yang memungkinkan berbagai pengkombinasian simbol-simbol itu. Sedangkan konsep adalah salah satu simbol yang paling penting dalam bahasa. Sains mulai dengan menciptakan konsep-konsep untuk mendeskripsikan dunia empiris. Semua ilmu mengembangkan peristilahan atau terminologi sendiri untuk mendefinisikan dan menggambarkan bagian dari dunia kehidupan yang ditanganinya (Mas'ood, 1990:109):

Konsep dalam ilmu sosial menunjuk pada sifat-sifat dari obyek yang dipelajarinya, misalnya orang, kelompok, pemerintah ataupun negara; yang relevan bagi studi tertentu. Konsep mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: **Pertama**, konsep berfungsi sangat penting dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil pemikiran tersebut. Konsep yang dipahami secara sama oleh berbagai ilmuwan memungkinkan terjadinya komunikasi diantara mereka. Konsep itu diabstraksikan dari kesan yang ditangkap melalui indera (*sense impression*) dan digunakan untuk menyampaikan dan mentransmisikan persepsi dan informasi. Konsep itu secara aktual tidak mewujudkan sebagai fenomena empiris. Konsep merupakan simbol fenomena dan bukan fenomena itu sendiri.

Kedua, konsep memperkenalkan suatu sudut pandang. Konsep berfungsi memperkenalkan suatu cara mengamati fenomena empiris. Melalui konseptualisasi saintifik, dunia persepsi dibuat teratur dan utuh. Dengan demikian, konsep memungkinkan seorang ilmuwan untuk mengangkat pengalaman pribadinya di kalangan ilmuwan-ilmuwan lain ke tingkat makna yang disepakati bersama. Konsep juga memungkinkan ilmuwan berinteraksi dengan lingkungan, yaitu dengan cara memberi definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep itu, dan menggunakan konsep itu sesuai dengan makna yang didefinisikannya. Dengan demikian

konsep bertindak sebagai *sentisizer* pengalaman dan persepsi; yang membuka wilayah observasi baru dan menutup wilayah lainnya.

Ketiga, konsep berfungsi sebagai sarana untuk mengorganisasikan gagasan, persepsi dan simbol, yaitu dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi. Dengan menggunakan konsep, ilmuwan melakukan kategorisasi, strukturisasi, penataan dan generalisasi terhadap fenomena yang dialami dan diamatinya.

Keempat, konsep berfungsi sebagai penyusun bangunan yang disebut teori. Karena teori berkaitan erat dengan penjelasan dan prediksi, maka konsep juga merupakan penyusun bagi bangunan yang disebut eksplanasi dan prediksi itu. Konsep merupakan unsur paling penting dalam teori karena konsep menentukan bentuk dan isi dari teori.

Generalisasi

Generalisasi ini mempunyai dua sifat penting: **Pertama**, sifat kondisional. Suatu generalisasi saintifik adalah pernyataan tentang hubungan empiris diantara konsep-konsep dalam bentuk kondisional. **Kedua**, sifat empiris. Semua generalisasi mempunyai, atau bisa diubah, menjadi bentuk kondisional; namun tidak semua pernyataan kondisional adalah generalisasi yang valid. Ada persyaratan lain yang harus dimiliki oleh suatu pernyataan agar bisa disebut generalisasi. Sesuai dengan sifat sains, generalisasi saintifik harus bersifat empiris, yaitu sedapat mungkin harus didasarkan pada pengamatan atau pengalaman.

Pada dasarnya generalisasi bisa dibedakan atas dasar ruang lingkup atau skop, yaitu tingkat universalitas dan tingkat keanekaragaman fenomena yang digeneralisasikan; dan probabilitasnya, yaitu derajat kepastian hubungan antar konsep dalam generalisasi itu. Dengan adanya dua kriteria ini, yaitu ruang lingkup dan probabilitas penerapan generalisasi, bisa dilakukan evaluasi kemampuan generalisasi menjelaskan fenomena. Probabilitas suatu generalisasi menentukan kemampuan generalisasi untuk menjelaskan (*explanatory power*) dan meramalkan (*predictive power*) fenomena.

Teori

Kata teori berasal dari bahasa Yunani

yang artinya melihat atau memperhatikan. Dari pengertian ini teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang sesuatu yang terjadi. Teori bisa diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup, yaitu teori mikro dan makro; berdasar jangkauannya, yaitu *middle range* atau *grand theory*; berdasar tingkat-tingkatnya; dan berdasar struktur internalnya. Berbagai proposisi teoritis yang dikenal dalam ilmu sosial memiliki kadar teoritis yang bervariasi. Berdasarkan kadar teori yang dimuatnya ini, bisa dipilah proposisi-proposisi itu dalam 3 tingkatan, yaitu: sistem klasifikasi (tipologi atau taksonomi), kerangka konseptual, dan sistem teoritis (teori). Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem klasifikasi. Di dalam melaksanakan proses penelitian, tipologi dan taksonomi bisa berfungsi penting dalam proses pembentukan teori. Tipologi adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan suatu benda atau makhluk hidup secara umum. Tipologi merupakan sistem klasifikasi atau sistem kategori, dan bukan sistem teoritis. Tipologi terdiri dari sistem kategori yang dibangun untuk mengorganisasikan hasil pengamatan sehingga hubungan antar kategori-kategori itu bisa dideskripsikan. Sebagai gambaran adalah pengklasifikasian berbagai tipe partai politik berdasarkan tipe tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat tipe ideal karena dalam kenyataannya tidak demikian. Akan tetapi untuk memudahkan pemahaman, tipologi ini sangat berguna. Sebagai contoh tipologi partai politik berdasar asas dan orientasi adalah pengklasifikasian partai politik menjadi tiga tipe yaitu: partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Berdasar komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua yaitu partai massa atau dukungan (*patronage*) dan partai kader. Sedangkan berdasar basis sosial dan tujuan, partai politik dapat digolongkan menjadi empat tipe, yaitu: partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial masyarakat, kelompok kepentingan tertentu, pemeluk agama tertentu, serta kelompok budaya tertentu (Surbakti, 2010:155-158). Suatu tipologi mempunyai hubungan dekat dengan dunia empiris, dan dalam pengertian ini kategori-kategori dalam tipologi itu mencerminkan realitas yang dideskripsikan. Tujuan tipologi

adalah membuat skema yang tertib untuk mengklasifikasi dan mendeskripsikan fenomena. Pada umumnya tipologi atau taksonomi ini tidak berfungsi eksplanasi, namun merupakan sarana deskripsi.

Kerangka konseptual. Proposisi yang setingkat lebih tinggi dari sistem klasifikasi adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual. Disini kategori-kategori deskriptif ditempatkan dalam suatu struktur proposisi-proposisi. Kerangka konseptual ini berada setingkat diatas tipologi karena proposisi-proposisinya bukan hanya meringkas, tetapi juga memberi eksplanasi dan prediksi terhadap hasil pengamatan empiris. Sebagai gambaran misalnya dalam kajian ilmu sosial tentang keluarga. Peneliti dalam masalah keluarga, seperti halnya para pakar ilmu lainnya, bertitik tolak dari asumsi-asumsi tertentu, konsep-konsep tertentu dan pendekatan-pendekatan yang menurut anggapan mereka paling tepat digunakan dalam upaya member penjelasan tentang fenomena yang dikaji, dalam mengorganisasikan berbagai unsure yang tercakup di dalamnya. Kerangka-kerangka seperti itu dinamakan *kerangka konseptual*. Ada pakar-pakar yang memandang keluarga sebagai pranata disamping pranata-pranata sosial lainnya, dan menjalankan perannya secara aktif maupun pasif. Di pihak lain, ada pakar yang berpendirian bahwa untuk memahami perilaku keluarga, maka yang perlu adalah mengikuti setiap tahap perkembangan yang telah dilalui oleh keluarga selama masa hidupnya (Ihromi, 1999:268-269).

Seseorang yang belajar tentang keluarga, tidak dapat menyimpulkan kerangka konseptual mana yang paling tepat untuk digunakan. Berbagai pendekatan atau kerangka konseptual tersebut direkam dalam kepustakaan tentang kajian keluarga dan ditawarkan secara saling bersaing kepada para peneliti sosiologi keluarga atau pengkaji keluarga yang menerapkan pendekatan ilmu sosial. Dalam kepustakaan sosiologi keluarga di Amerika misalnya, terdapat

5 jenis kerangka konseptual tentang keluarga yaitu pendekatan fungsional-struktural, pendekatan institusional, pendekatan situasional, pendekatan interaksionis, dan pendekatan perkembangan (Ihromi, 1999: 269).

Sistem teoritik. Proposisi yang tertinggi adalah sistem teoritik. Ini merupakan kombinasi antara sistem klasifikasi dengan kerangka konseptual; namun deskripsi, eksplanasi, dan prediksi disini dikombinasikan secara sistematis. Kalau ilmuwan sosial bisa memperoleh proposisi teoritis yang demikian, maka pekerjaan menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena menjadi lebih mudah. Terdapat 2 macam format dasar teori berdasarkan struktur internalnya, yaitu teori yang aksiomatis (disebut juga teori hirarkis atau logika deduktif), dan teori yang berangkai (*concatenated*). Teori aksiomatis berarti bahwa teori diartikan sebagai generalisasi yang dihubungkan secara deduktif atau hirarkis. Deduksi adalah ciri pokok teori, sehingga agar bisa disebut teori suatu pernyataan harus berbentuk suatu sistem aksiomatis.

Suatu sistem aksiomatis terdiri dari aksioma, definisi, dan teorema. Aksioma adalah pernyataan yang berfungsi sebagai premis dari suatu argument deduktif. Teorema adalah pernyataan yang diturunkan secara logis dari aksioma dan berfungsi sebagai kesimpulan dari suatu argument deduktif. Pernyataan yang mempunyai universalitas paling tinggi adalah aksioma, sedangkan pernyataan yang lebih rendah disebut teorema. Karena teorema bisa deduksi dari aksioma, teorema adalah pernyataan yang lebih rendah dibanding dengan aksioma. Format teori yang bertingkat-tingkat inilah yang membuatnya disebut juga tipe teori hirarkis.

Teori *concatenated* adalah bentuk teori yang tidak mensyaratkan adanya hubungan logis-formal atau deduktif diantara generalisasi-generalisasi atau pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya. Teori ini mendapat nama demikian karena memang berbentuk rangkaian pernyataan dalam suatu argument yang tidak harus bersifat deduktif. Didalam menilai teori bisa didasarkan atas 2 kriteria yaitu jangkauan (*range*) dan daya eksplanasinya (*explanatory power*). Teori yang memiliki jangkauan terbatas meliputi ruang lingkup kasus-kasus atau periode waktu yang terbatas. Artinya generalisasinya hanya berlaku dalam batas-batas tertentu dan tidak universal.

Sedangkan daya eksplanasi suatu teori adalah suatu konsep yang lebih kompleks dan melibatkan dua dimensi, yang masing-masing sering saling bertentangan yaitu *parsimoni* dan ketepatan deskriptif. Parsimoni adalah kemampuan untuk mengatakan sebanyak mungkin dengan sesedikit mungkin kata. Menemukan suatu eksplanasi yang *parsimonius* mungkin tidak sukar, namun tidak mudah menemukan eksplanasi yang *parsimonius* dengan ketepatan deskriptif yang memadai. Boleh dikatakan bahwa daya eksplanasi adalah kemampuan menjelaskan perilaku dengan sedikit anomali. Teori yang paling kuat daya eksplanasinya adalah yang paling sedikit anomalnya, dan paling banyak memiliki kandungan empiris yang terbukti. Sebuah ciri kekuatan teori adalah kemampuan untuk membuat prediksi yang berhasil.

Sanggahan dan kritikan terhadap metode ilmiah

Ada 3 sanggahan terhadap pandangan baku (*the standard view*) ilmu pengetahuan mengenai metode ilmiah. Ini menyangkut 3 masalah yaitu: (1) perbedaan antara pernyataan observasional dengan pernyataan teoritis, (2) perbedaan antara fakta dengan nilai, (3) struktur penjelasan. Masalah-masalah ini dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, perbedaan antara pernyataan observasional dengan pernyataan teoritis. Pandangan baku ilmu pengetahuan melibatkan suatu asumsi bahwa kedua pernyataan itu berbeda. Sebuah pernyataan observasional dipandang secara langsung dapat diverifikasi, karena ia dapat dibandingkan dunia empiris; sedangkan pernyataan teoritis tidak dapat diverifikasi secara langsung, tetapi dikonstruksi atas dasar pernyataan pernyataan observasional dan berfungsi untuk menjelaskannya.

Kedua, perbedaan antara fakta dengan nilai. Para filosof menyerang pendapat bahwa nilai tidak dapat secara logis diambil dari pernyataan fakta. Namun hal ini ditanggapi seorang ilmuwan yaitu Charles Taylor, yang mendasarkan sanggahannya atas pendapat sebagai berikut (Taylor, 1967:90) : (1) Penjelasan seperti para filosof itu menghambat evaluasi. Hal ini karena penjelasan memperinci apa yang dijelaskan (diobservasi), dan bagaimana harus dijelaskan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa observasi yang diambil diluar range

penjelasan akan diambil secara serius. (2) Sebuah pernyataan yang mempunyai efek bahwa sesuatu adalah baik, tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada yang mendukung, yaitu alasan rasional dan empiris. (3) Sesuatu yang dianggap baik itu jika memenuhi kebutuhan, keinginan dan tujuan manusia. Disini terlihat bahwa sesuatu memenuhi keinginan manusia adalah alasan pernyataan fakta, sedangkan sesuatu adalah baik merupakan pernyataan nilai. Jadi dapat dikatakan bahwa antara fakta dan nilai terdapat hubungan.

Ketiga, sanggahan yang memusatkan perhatian pada sifat penjelasan ilmu pengetahuan. Model nomologis yang digunakan bukanlah suatu deskripsi yang akurat dalam ilmu pengetahuan. Dikatakan bahwa penjelasan dengan model ini tidak memuaskan, karena hokum-hukum sebab akibat terlalu kabur dalam memberikan pengertian. Sedangkan para ilmuwan terkadang puas dengan penjelasan-penjelasan yang tidak mencakup hubungan sebab akibat sedemikian itu.

Contohnya adalah, ilmuwan politik berpendapat bahwa mereka dapat menjelaskan perilaku voting dengan baik, dengan menunjukkan sebuah kombinasi efek-efek berbagai faktor daripada menggunakan hukum sebab akibat. Pilihan suara ini dihubungkan dengan agama, ras dan sebagainya. Selain itu sanggahan terhadap model nomologis didasarkan bahwa kebanyakan hubungan sebab akibat lebih bersifat universalitas daripada probabilistik.

Bagi ilmuwan ilmu politik, adanya kritikan-kritikan itu tidaklah merupakan usaha untuk meremehkan kegunaan metode ilmu pengetahuan. Kritikan ini menunjukkan bahwa sains dalam ilmu politik bukan merupakan proses mekanis dan teknis yang murni, yang selanjutnya menimbulkan kebenaran otomatis yang tak dapat diingkari. Namun seringkali pula disayangkan bahwa deskripsi standar ilmu pengetahuan memberikan kesan sebagai aktivitas yang steril dan kurang manusiawi. Ilmuwan politik sendiri merupakan manusia; yang cenderung melihat apa yang mereka ingin melihat. Oleh karena itu observasi ilmuwan dapat memengaruhi apa yang ditelitinya. Dari sini wajar bila ilmuwan sadar maupun tak sadar terbelok dalam observasinya.

Kesimpulan

Ilmuwan dalam bidang sosial beranggapan bahwa tujuan tertinggi ilmu pengetahuan adalah meminimalkan bias. Tujuan inilah yang menjadi

pondasi dari pandangan baku. Ada beberapa aspek pandangan baku yang dimaksudkan meminimalkan bias ini. Pertama, titik berat pada peranan observasi langsung. Kedua, observasi oleh seorang sarjana tidak diterima sebagai verifikasi untuk sebuah hukum ilmiah. Observasi terus menerus adalah perlu. Ketiga, peneliti diharapkan untuk memperinci dengan jelas operasi apa yang mereka lakukan dalam penelitian, dengan tujuan untuk mengadakan pembagian pengalaman yang akurat diantaranya masyarakat ilmuwan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Grigsby, Ellen, *Analyzing Politics: An introduction to Political Science*, Cengage Learning, Inc, Belmont, 2012.

Ihromi, T.O (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1999.
Isaak, Alan.C, *Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the Methodology of Political Inquiry*, the Dorsey Press, Homewood, Illinois, 1975.

Mas' oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Yogyakarta, 1990.

McGaw, Dickinson & Watson, George, *Political and Social inquiry*, John Wiley, New York, 1976.
Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2010.

Somit, Albert & Tanenhaus, Joseph, *The development of Political Science: From Burgess to Behavioralism*, Irvington Publishers Inc., New York, 1982.

Zuckerman, Alan.S, *Doing Political Science: An Introduction to Political Analysis*, Westview Press Inc., Colorado, 1991.